

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang langsung dibagikan kepada responden. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk ditabulasi ke dalam *Microsoft Office Excel 2010*, kemudian diolah dengan menggunakan *software SPSS* versi 22. Data tersebut diolah sesuai dengan metode analisis data yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 50 rangkap kuesioner dan dikembalikan sebanyak 35 rangkap kuesioner jadi terdapat 5 rangkap kuesioner yang tidak kembali. Data hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner dikirim	50
Kuesioner yang kembali	35
Kuesioner yang tidak kembali	15
Kuesioner yang ditolak	-
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	35
Tingkat pengembalian kuesioner	70%

4.2 Deskripsi Data

Deskriptif adalah menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat simpulan yang berbentuk umum atau generalisasi. Dalam deskripsi data ini penulis akan menggambarkan kondisi responden yang menjadi sampel penelitian ini dilihat dari karakteristik responden antara lain:

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

1. Umur Responden

Gambaran umum mengenai anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan umur pada saat pengambilan sampel adalah:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase (%)
26 - 30 tahun	1	2,9
31 - 35 tahun	2	5,7
36 - 40 tahun	14	40,0
> 40 tahun	18	51,4
Jumlah	35	100

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa yang paling dominan pada anggota DPRD Kota Bandar Lampung adalah responden dengan umur > 40 tahun sebanyak 18 orang (51,4%).

2. Jenis Kelamin Responden

Gambaran umum mengenai anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki Laki	26	74,3
Perempuan	9	25,7
Jumlah	35	100

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa yang paling banyak anggota DPRD Kota Bandar Lampung adalah laki-laki yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 74,3%.

3. Status Responden

Gambaran umum mengenai anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan status adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Status Responden

Status	Jumlah	Persentase (%)
Sudah menikah	32	91,4
Belum menikah	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa yang paling banyak anggota DPRD Kota Bandar Lampung adalah yang sudah menikah yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 91,4%.

4. Masa Kerja

Gambaran umum mengenai anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan masa kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1-5 tahun	26	74,3
> 5 tahun	9	25,7
Jumlah	35	100

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa yang paling banyak anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan masa kerja 1-5 tahun yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 74,3%.

5. Pendidikan

Gambaran umum mengenai anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Pendidikan

Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
D3	10	28,6
Strata 1	19	54,3
Strata 2	6	17,1
Jumlah	35	100

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa yang paling banyak anggota DPRD Kota Bandar Lampung adalah dengan pendidikan setingkat Strata 1 yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 54,3%.

4.3 Hasil Uji Persyaratan Instrumen

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Sebelum dilakukan pengolahan data maka seluruh jawaban yang diberikan oleh responden diuji dengan uji validitas dan uji realibilitas yang diuji cobakan pada responden. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment*. Dengan penelitian ini, uji validitas untuk menghitung data yang akan dihitung dan proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 20.0. Hasil pengujian validitas menggunakan kriteria pengujian untuk uji ini adalah apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka valid dan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka tidak valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kuesioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Simpulan
Butir 1	0,717	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,907	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,521	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 4	0,659	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 5	0,599	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 6	0,888	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji validitas variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang bersangkutan mengenai Penyajian laporan keuangan daerah. Hasil yang didapatkan yaitu nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,3246), dimana nilai r_{hitung} paling tinggi yaitu 0,907 dan paling rendah 0,521. Dengan demikian seluruh item pernyataan Penyajian laporan keuangan daerah dinyatakan valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kuesioner Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Simpulan
Butir 1	0,925	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,939	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,925	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji validitas variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang bersangkutan mengenai

aksesibilitas laporan keuangan. Hasil yang didapatkan yaitu nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,3246), dimana nilai r_{hitung} paling tinggi yaitu 0,939 dan paling rendah 0,925. Dengan demikian seluruh item pernyataan aksesibilitas laporan keuangan dinyatakan valid.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan (X₃)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Simpulan
Butir 1	0,776	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,911	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,924	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji validitas variabel akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (X₃) dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang bersangkutan mengenai akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan. Hasil yang didapatkan yaitu nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,3246), dimana nilai r_{hitung} paling tinggi yaitu 0,924 dan paling rendah 0,776. Dengan demikian seluruh item pernyataan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dinyatakan valid.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kuesioner Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Simpulan
Butir 1	0,780	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,742	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,716	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 4	0,645	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 5	0,405	0,3246	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Tabel 4.10 hasil uji validitas variabel transparansi pengelolaan laporan keuangan (Y) dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang bersangkutan mengenai transparansi pengelolaan laporan keuangan. Hasil yang didapatkan yaitu nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,3246), dimana nilai r_{hitung} paling tinggi yaitu 0,780 dan paling rendah 0,405. Dengan demikian seluruh item pernyataan transparansi pengelolaan laporan keuangan dinyatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Setelah uji validitas maka pengujian kemudian melakukan uji reliabilitas terhadap masing-masing instrumen variabel X_1 , variabel X_2 , variabel X_3 dan instrumen variabel Y menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan program SPSS 22.0. Hasil uji reliabilitas setelah dikonsultasikan dengan daftar interpretasi koefisien r dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Alpha Chronbach</i>	Koefisien r	Simpulan
Penyajian laporan keuangan daerah	0,819	0,8000-0,9999	Reliabel tinggi
Aksesibilitas laporan keuangan	0,917	0,8000-0,9999	Reliabel tinggi
Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan	0,833	0,8000-0,9999	Reliabel tinggi
Transparansi pengelolaan laporan keuangan	0,687	0,6000-0,7999	Reliabel sedang

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,819 untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) dengan tingkat reliabel tinggi, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,917 untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dengan tingkat reliabel tinggi, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,833 untuk variabel akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (X_3) dengan tingkat reliabel tinggi dan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,687 untuk variabel transparansi pengelolaan laporan keuangan (Y) dengan tingkat reliabel sedang.

4.4 Uji Persyaratan Analisis Data

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi terdistribusi secara normal atau tidak maksudnya adalah apakah dalam regresi variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal, karena test statistik yang di hasilkan valid. Untuk menguji normalitas dapat melalui cara

kolmogrow smirnow test (uji K-S). Untuk uji *kolmogorow smirnov* yaitu jika nilai hasil uji K-S > dibandingkan nilai signifikan 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

		Transparansi LK
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19.3714
	Std. Deviation	2.34001
Most Extreme Differences	Absolute	.177
	Positive	.129
	Negative	-.177
Test Statistic		.177
Asymp. Sig. (2-tailed)		.007 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa berdasarkan uji *kolmogorow smirnov* diperoleh nilai hasil uji K-S = 0,007 < nilai signifikan 0,05 yang berarti bahwa sebaran data adalah tidak normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independennya. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan VIF dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4.13 Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.079	1.854		
	Penyajian_LK	.272	.095	.656	1.525
	Aksesibilitas	.240	.141	.555	1.803
	Akuntabilitas	.529	.141	.560	1.785

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan VIF (*variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance, dimana nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.5 Analisis Data

4.5.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka diperoleh data analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi linier berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.079	1.854		2.200	.035
	Penyajian_LK	.272	.095	.329	2.863	.007
	Aksesibilitas	.240	.141	.214	1.708	.098
	Akuntabilitas	.529	.141	.466	3.745	.001

a. Dependent Variable: Transparansi_LK

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Tabel 4.14 menjelaskan bahwa di atas merupakan hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 4,079 + 0,272 \text{ PLKD} + 0,240 \text{ ALK} + 0,529 \text{ APLK} + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 4,079 yang berarti bahwa tanpa adanya penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan, maka besarnya transparansi pengelolaan laporan keuangan adalah 4,079 satuan.

2. Koefisien Penyajian laporan keuangan daerah

Artinya terdapat hubungan positif antara Penyajian laporan keuangan daerah dengan transparansi pengelolaan laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, maka akan meningkatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan, dengan catatan lain dianggap tetap atau jika penyajian laporan keuangan daerah meningkat sebesar satu satuan maka kinerja akan meningkat sebesar 0,272 satu satuan.

3. Koefisien Aksesibilitas laporan keuangan

Artinya terdapat hubungan positif antara aksesibilitas laporan keuangan dengan transparansi pengelolaan laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik aksesibilitas laporan keuangan, maka akan meningkatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan, dengan catatan lain dianggap tetap atau jika aksesibilitas laporan keuangan naik sebesar satu satuan maka kinerja akan meningkat sebesar 0,240 satu satuan.

4. Koefisien akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan

Terdapat positif negatif antara akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dengan transparansi pengelolaan laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan, maka akan meningkatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan, dengan catatan lain dianggap tetap atau jika akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan naik sebesar satu satuan maka kinerja akan meningkat sebesar 0,529 satu satuan.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut:

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka diperoleh:

Tabel 4.15 Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.079	1.854		2.200	.035
	Penyajian_LK	.272	.095	.329	2.863	.007
	Aksesibilitas	.240	.141	.214	1.708	.098
	Akuntabilitas	.529	.141	.466	3.745	.001

a. Dependent Variable: Transparansi_LK

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa:

1. Hasil uji t_{hitung} untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah sebesar 2,863 ($t_{hitung} = 2,863 > t_{tabel} = 1,697$) dan nilai signifikan sebesar 0,007 yang berarti bahwa ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Hasil uji t_{hitung} untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 1,708 ($t_{hitung} = 1,708 > t_{tabel} = 1,697$) dan nilai signifikan sebesar 0,098 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Hasil uji t_{hitung} untuk variabel akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan sebesar 3,745 ($t_{hitung} = 3,745 > t_{tabel} = 1,697$) dan nilai signifikan sebesar 0,001 yang berarti bahwa ada pengaruh akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4.6.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS (*Statistical Program and Service* seri 22).

Tabel 4.16 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136.085	3	45.362	28.076	.000 ^b
	Residual	50.086	31	1.616		
	Total	186.171	34			

a. Dependent Variable: Transparansi_LK

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Penyajian_LK, Aksesibilitas

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa nilai $F_{hitung} = 28,076 > F_{tabel} = 8,6166$ dengan signifikansi = 0,000 ($< \alpha = 0,05$) yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penyajian laporan keuangan daerah (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (X_3) terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan (Y) atau H_a diterima.

4.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Penggunaan *R square* adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan variabel independen ke dalam model, maka *R square* pasti meningkat tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak. Tidak seperti *R square*, nilai *adjusted R square* dapat naik atau turun apabila terdapat tambahan variabel independen kedalam model (Ghozali, 2011).

Tabel 4.17 Koefisien Determinasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 ^a	.731	.705	1.27110

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Penyajian_LK, Aksesibilitas

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

Tabel 4.17 menjelaskan bahwa nilai $R^2 = 0,731 \times 100\% = 73,1\%$ yang artinya besarnya pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar 73,1% sedangkan selebihnya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi pengelolaan laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dari pengetahuan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan suatu entitas baik sektor publik maupun swasta.

Hubungan antara penyajian laporan keuangan daerah dengan transparansi laporan keuangan daerah adalah dengan adanya penyajian laporan keuangan maka akan tercipta transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Teori ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Apriliani dkk yang menunjukkan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan. Penyajian Keuangan yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah serta semakin sesuai dengan SAP maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah (Apriliani dkk, 2015). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pasaribu yang menunjukkan penyajian laporan keuangan daerah

berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Dimana dengan menyajikan laporan keuangan SKPD maka akan berimplikasi terhadap penurunan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD dengan alasan, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah menurut penelitian tersebut nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Pasaribu, 2011).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah Daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sehingga pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4.7.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi pengelolaan laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan dan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk meningkatkan pengelolaan, pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas khususnya di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan didefinisikan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (Mulyana, 2006).

Aksesibilitas laporan keuangan akan mempengaruhi transparansi laporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan transparansi yang baik. Teori (Mardiasmo, 2009) ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Apip dan Maesaroh, yang menyatakan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan (Apip dan Maesaroh, 2016). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani yang menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah, dengan alasan aksesibilitas laporan keuangan masih rendah. Hal ini dikarenakan informasi laporan keuangan yang tidak secara langsung tersedia untuk para pengguna dan terbatasnya akses dalam memperoleh informasi keuangan menyebabkan pengguna sulit dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Anggraeni dan Yuliani, 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan Daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan asset Pemerintah Kota Bandar

Lampung maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4.7.3 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi pengelolaan laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Tidak adanya pengaruh yang ditunjukkan oleh akuntabilitas laporan keuangan daerah mengindikasikan bahwa semakin baiknya akuntabilitas laporan keuangan daerah belum tentu dapat meningkatkan nilai transparansi laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Wahida, 2015).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Teori ini juga didukung oleh Logos dalam Kusuma yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan daerah dengan alasan transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas (Kusuma, 2012).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma yang menunjukkan akuntabilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap transparansi laporan keuangan daerah pada pemerintah kota Medan, dengan alasan transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas (Kusuma, 2012).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah selain berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi, pemerintah juga memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Maka kemudahan atau aksesibilitas merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan sebagai bentuk transparansi pemerintah. Hal ini juga bertujuan

untuk menunjukkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah terhadap masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan.

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan *good governance* yang sedang dilakukan bangsa Indonesia pada saat ini terutama akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Akuntabilitas publik masyarakat bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (*public policy*), mengatur dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas terutama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dan transparansi pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.